

INTEGRASI PENDIDIKAN SAFETY RIDING DALAM MATA PELAJARAN PPKn SEBAGAI UPAYA PENDIDIKAN SADAR LALU LINTAS (STUDI KASUS SMK PGRI 1 TAMAN PEMALANG)

Natal Kristiono
Dosen PPKn FIS Unnes.
natalkristiono@mail.unnes.ac.id

Abstract

Lack of traffic awareness causes problems in its implementation. The purpose of this research was to familiarize the orderly traffic community. This research uses interview techniques with the location of this study is the SMK Pemri 1 Taman Pemalang, Abdul Wahid Hasyim street No. 4 South Wanarejan. The efforts taken by Taman PGRI 1 Taman in instilling safety riding education are the application of integrated curriculum on traffic material in Civic learning, the separation between car and motorbike parking lots, the existence of PKS. Supporting factors for the implementation of safety riding education are the existence of policies that provide full support, the socialization that is often carried out by students and STP2K.

Keyword: *Education, traffic, Civic, safety ridding*

Abstrak

Kurangnya kesadaran berlalu lintas menimbulkan masalah di dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membiasakan masyarakat tertib lalu lintas. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan lokasi penelitian ini adalah SMK PGRI 1 Taman Pemalang, Jalan Abdul Wahid Hasyim No 4 Wanarejan Selatan. Upaya yang ditempuh oleh SMK PGRI 1 Taman dalam menanamkan pendidikan *safety riding* yaitu penerapan kurikulum tentang materi lalu lintas yang terintegrasi dalam pembelajaran PPKn, adanya pemisahan antara tempat parkir mobil dan motor, adanya PKS. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan *safety riding* yaitu adanya kebijakan yang memberikan dukungan penuh, adanya sosialisasi yang sering dilakukan oleh kesiswaan dan STP2K.

Kata kunci: Pendidikan, lalu lintas, PPKn, *safety ridding*.

PENDAHULUAN

Negara yang dijalankan dengan suatu keteraturan tentunya akan mencapai suatu ketertiban. Masyarakat sangat menginginkan suatu Negara ataupun peraturan yang ditetapkan dapat menciptakan suatu hal yang lebih baik terutama dalam menciptakan keamanan serta ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dapat mengimplementasi ketertiban dalam kehidupan sehari-harinya sehingga tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban itu bukan hanya tugas dari lembaga keamanan ataupun pemerintah namun menjadi tugas bersama. Salah satu unsur ketertiban masyarakat yang perlu dilihat yaitu tentang ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya. Hal ini menjadi contoh konkrit dari keteraturan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Ketertiban dalam berkendara di jalan raya menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Masyarakat selalu menginginkan rasa nyaman dan aman ketika berkendara di jalan raya untuk itulah hal ini perlu dipikirkan, sehingga konsep peraturan yang diterapkan dapat memfasilitasi semua pengguna jalan mulai dari pejalan kaki sampai penggunaan kendaraan bermotor dengan berbagai jenisnya. Kunci sukses di dalam ketertiban di jalan raya terjadi apabila peraturan yang diterapkan dijalankan oleh semua pemakai jalan raya. Namun inilah yang kadang menjadikan suatu kendala karena tidak semua pemakai

jalan memperhatikan hal ini. Sebagian dari mereka mengerti betul peraturan yang perlu diterapkan namun merasa enggan untuk menjalankan peraturan tersebut. Kurangnya kesadaran berlalu lintas inilah yang kemudian menimbulkan masalah di dalam pelaksanaannya.

Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur ketertiban berlalu lintas dibuat sebagai pemecahan masalah yang sering muncul di dalam kegiatan berlalu lintas. Namun unsur penting dari ketertiban itu tetap ada pada para pengguna jalan. Untuk itu yang perlu dipersiapkan lebih adalah mental dari para pengguna jalan sehingga mereka tidak seenaknya sendiri dalam berkendara. Upaya yang perlu lebih ditingkatkan adalah kegiatan sosialisasi dan kegiatan yang memunculkan rasa kesadaran akan pentingnya ketertiban di dalam berlalu lintas.

Konsep ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak kepolisian, namun mungkin memang membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk memunculkan kesadaran di dalam masyarakat. Dalam menciptakan kesadaran ini membutuhkan pembiasaan sehingga kalau sudah muncul suatu kebiasaan yang positif dalam berlalu lintas maka kesadaran itu akan muncul tanpa adanya paksaan berupa penerapan sanksi yang berat dalam peraturan berlalu lintas.

Upaya memunculkan kesadaran berlalu lintas ini mendapatkan prosentasi strategi penciptaan ketertiban berlalu lintas yang lebih diprioritaskan karena di dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya diamanatkan bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang menjadi salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya memunculkan kesadaran ini bukan hanya peran pemerintah ataupun pihak kepolisian namun perlu juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Tanpa mengurangi peran pemerintah maupun kepolisian dunia pendidikan dapat diikut sertakan untuk mengambil peran sebagai tonggak penciptaan mental-mental yang mendukung penciptaan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia pendidikan membekali siswa untuk memiliki kemampuan afektif ataupun sikap yang positif apalagi sebagai salah satu bagian dari warga Negara yang harus mengabdikan dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Pendidikan sejak dini inilah yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah untuk menciptakan suatu kesadaran berlalu lintas. Dalam artikel ini kami ingin menitik beratkan pendidikan berlalu lintas di dalam lingkungan sekolah sebagai suatu wahana belajar siswa untuk dapat memiliki suatu kesadaran

berlalu lintas dalam arti yang sebenarnya. Untuk itulah judul yang akan penulis uraikan adalah **"Integrasi Pendidikan Safety Riding Dalam Mata Pelajaran Ppkn Sebagai Upaya Pendidikan Sadar Lalu Lintas (Studi Kasus SMK PGRI 1 Taman Pematang)"**.

Pendidikan Safety Riding

Safety riding merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan mengemudi, kiat-kiat aman berkendara. Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang berkerjasama dengan sector bisnis, media, LSM. Yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, masyarakat umum, pengemudi angkutan umum atau siapa saja yang peduli terhadap dengan masalah keselamatan berkendara. Dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan. Implementasi dari Safety Riding dapat melalui kegiatan touring, pendidikan dan pelatihan berkendara, sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu pada siang hari dan sebagainya.

Maksud Program keselamatan mengendarai atau berkendara aman di jalan raya bekerja sama dengan stake holders dalam menangani masalah keselamatan lalu lintas. Tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengendarai kendaraan bermotor dan peningkatan pengetahuan berlalu lintas.

Pendidikan Kesadaran Berlalu Lintas

Salah satu tujuan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” . Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan, keamanan bangsa dan negara dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya keselamatan dan keamanan dalam menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan raya mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk menjalankan sistem keamanan jalan raya perlu dituangkan dalam suatu aplikasi nyata dalam kehidupan berlalu lintas di jalan raya. Lalu lintas perlu ditanamkan kepada generasi muda kita salah satunya dengan melalui proses pendidikan. Lalu Lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Jadi, pendidikan lalu lintas dapat diartikan melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk

melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas.

Pendidikan Lalu Lintas menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda. Melalui Pendidikan Lalu lintas ini diharapkan generasi muda secara sadar mampu mengimplemasikan etika dan budaya untuk mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas yang santun, aman, nyaman, tertib dan selamat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan upaya ini dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas diantara peserta didik saja, tetapi juga mempunyai dampak kepada orang tua dan anggota masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Penentuan obyek penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian sehingga permasalahannya tidak telalu luas dan umum. Adapun lokasi penelitian ini adalah SMK PGRI 1 Taman Pemalang, Jalan Abdul Wahid Hasyim No 4 Wanarejan Selatan.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pendidikan safety ridding yang diterapkan di SMK PGRI 1 Taman yang meliputi personal dan prosedur.

Personal Personal dalam penelitian ini meliputi Pimpinan , guru dan siswa. Prosedur disini adalah upaya dan mekanisme yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam pendidikan safety ridding.

Menurut Lor Land, menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2002: 112). Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (Arikunto, 2002:198). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Siswa SMK PGRI 1 Taman.

Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan SMK PGRI 1 Taman dan Jajaran Guru Pembina STP2K. Moleong (2002:90) dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Lalu Lintas dalam pelajaran PPKN

Pendidikan berlalu lintas diterapkan dalam dunia pendidikan merupakan suatu usaha yang perlu dilakukan, karena pendidikan formal menawarkan suatu upaya yang jelas dimana terdapat tujuan dan program yang berkesinambungan. Kurikulum yang ditentukan memberikan arahan di

dalam menyelenggarakan pendidikan Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Di sisi lain angka kecelakaan di jalan raya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2008 dan 2009 pada anak seusia SD/SMP meningkat tajam dari 6091 menjadi 11508. Data kecelakaan tahun 2007 – 2009 menonjol tajam menimpa pada usia produktif antara 16 – 40 tahun. Berdasarkan data statistik kecelakaan, diperoleh gambaran pada tahun 2015, jumlah kecelakaan mencapai 98,9 ribu kasus (Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik). Upaya pemerintah yang dilakukan secara represif, tidak membuat jera pengguna jalan lalu lintas.

Untuk itulah penanaman nilai di dalam proses pendidikan dirasakan lebih tepat. Pendidikan Lalu lintas di sekolah ditekankan pada tataran moral action, tetapi juga tidak lepas dari tataran pengetahuan, sikap dan kebiasaan berperilaku. Untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action, implementasinya di mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Untuk sampai ke moral action, sekolah dapat mengembangkan pendidikan lalu lintas melalui

pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran. PPKn merupakan mata pelajaran yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan memberikan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. PPKn merupakan hasil dari keseluruhan program sekolah yang meliputi pembelajaran, model/metode pembelajaran, aktifitas peserta didik, pengalaman peserta didik, dan fungsi peserta didik sebagai warganegara dengan segala hak dan tanggung jawabnya dalam suasana yang demokratis.

Berdasar analisis data latar belakang tersebut, maka dipandang amat penting untuk mengintegrasikan pendidikan lalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan nasional yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Saat ini Kepolisian RI telah mengambil langkah positif melakukan kerjasama (MoU) dengan Kemendiknas Tgl. 8 Maret 2010 dengan SK MoU No. 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tentang Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Pendidikan Nasional. Implementasi dari kerjasama tersebut diharapkan nantinya akan terintegrasi Pembelajaran Pendidikan Lalu Lintas untuk siswa SD, SMP, SMA dan yang sederajat melalui mata pelajaran PPKn.

Pendidikan lalu lintas ada kaitannya dengan pendidikan

kewarganegaraan dimana pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas, yang sopan, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga keduanya memfokuskan pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai sistem nilai yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Selain itu pendidikan kewarganegaraan meliputi pembelajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai warganegara, hal ini senada dengan pendidikan lalu lintas yang juga membina karakter bangsa melalui pendidikan nilai-nilai, etika dan budaya tertib lalu lintas.

Ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam pengintegrasian pendidikan lalu lintas di mata pelajaran PPKn yaitu antara lain (1) Menganalisa substansi dan hubungan pendidikan lalu lintas dengan Standar Isi, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PPKn, (2) Mengintegrasikan indikator pendidikan lalu lintas ke dalam Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar, (3) Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam Silabus pembelajaran PPKn, (4) Menyusun

model integrasi pendidikan lalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (5) Implementasi proses pembelajaran Pendidikan Lalu Lintas mengacu pada RPP yang sudah terintegrasi oleh materi Pendidikan Lalu Lintas.

Adapun lingkup materi pendidikan lalu lintas antara lain (1) Pengertian Lalu Lintas, (2) Peraturan Perundangan Berlalu Lintas, (3) Pentingnya Rambu-rambu Lalu Lintas, (4) Marka Jalan, (5) Alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas, (6) Pengamanan diri sebagai pemakai jalan, (7) Tata cara berlalu lintas yang benar, (8) Tips aman perjalanan, (9) Hak dan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas, (10) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas, (11) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas, dan (12) Praktik isyarat pengaturan lalu lintas.

Dalam pendidikan kewarganegaraan materi tentang pendidikan lalu lintas dapat diintegrasikan, misalnya dalam beberapa hal berikut ini, antara lain:

- a. Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk peraturan perundangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

termasuk mentaati rambu-rambu lalu lintas.

- c. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat, seperti memberi kesempatan penyeberang jalan,
- d. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi
- e. Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan keindividuannya
- f. Secara implisit indikator ketercapaian pendidikan lalu lintas, sudah tertuang dalam standar kelulusan pada mata pelajaran PPKn
- g. Seperti sikap positif terhadap norma-norma, berarti mentaati semua aturan yang ada termasuk Peraturan lalu Lintas.
- h. Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk mentaati rambu-rambu lalu lintas merupakan wujud perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan Pendidikan Safety Riding di SMK PGRI 1 Taman

Pendidikan berlalu lintas perlu adanya pembiasaan sikap dan ditanamkan dalam berlalu lintas diperlukan suatu tanda yang menunjukkan perintah dengan simbol-simbol yang biasa disebut dengan rambu-rambu. Penerapan rambu-rambu lalu lintas memberikan

komunikasi non verbal kepada pengguna jalan sehingga kelancaran berkendara dapat dinikmati. Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan maka bahan harus terbuat dari material yang reflektif (memantulkan cahaya). Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu sebagai berikut : rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan dan perintah, serta rambu perintah. Menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan maka secara garis besar sistem perambu dapat dikelompokkan atas: Rambu tetap, dan rambu tidak tetap. Dimana rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap, sedangkan rambu tidak tetap adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindahkan.

Dalam penanaman sikap disiplin berlalu lintas siswa dibelajarkan secara langsung dengan penerapan rambu-rambu yang dipasang dilingkungan sekolah sehingga siswa mengenal symbol-simbol tersebut dengan baik.

Hal ini membiasakan siswa untuk peduli terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Di SMK PGRI 1 Taman sengaja memasang rambu-rambu antara lain rambu-rambu dilarang masuk, rambu-rambu untuk parkir mobil dan motor, adanya jalur hijau untuk pejalan kaki, jalur masuk dan keluar kendaraan siswa, himbauan penggunaan spion, helm dan kelengkapan kendaraan lainnya seperti SIM dan STNK. Rambu-rambu tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengatur arus lalu lintas dan tata parkir yang nyaman untuk semua warga sekolah.

Dalam memberikan pendidikan lalu lintas SMK PGRI 1 Taman juga menerapkan kegiatan sosialisasi, kegiatan ini dibuat dalam bentuk himbauan secara lisan maupun tertulis berupa peraturan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh tim dari STP2K (Satuan Tugas Pembimbingan dan Penyuluhan Kesiswaan). Kegiatannya dengan cara bertahap diawali dengan mengenalkan siswa kepada rambu-rambu yang ada dilingkungan sekolah serta larangan yang tidak boleh dilakukan siswa dilanjutkan kepada sistem pengawasan berlaku aturan berlalu lintas di sekolah. Selain sistem pengawasan STP2K, sekolah juga memberikan teguran kepada siswa yang melanggar aturan berlalu lintas ataupun ketika tidak memiliki SIM dan tidak memasang kelengkapan berkendara seperti spion ataupun helm. Selain kegiatan yang dilakukan oleh STP2K

sosialisasi tersebut juga dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu PKS. Pendidikan safety riding tentunya sangat berkaitan dengan kerja PKS karena salah satu penghubung antara kepolisian dengan pihak sekolah yaitu PKS. Program kerja PKS di antaranya menanamkan sikap disiplin berlalu lintas, sehingga kegiatan sosialisasi ini tentunya harus melibatkan PKS. Kegiatan sosialisasi ini tentunya juga melibatkan Satlantas. Himbuan dari satlantas tersebut semakin memperkuat program safety riding yang dicanangkan di dalam sekolah.

Pendidikan safety riding di SMK PGRI 1 Taman berupaya mengintegrasikan sikap disiplin berlalu lintas dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan keteladanan, kegiatan spontan, pengkondisian lingkungan serta kegiatan rutinserta dengan memasukkan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

Dalam pelaksanaan pendidikan safety riding di SMK PGRI 1 Taman memberikan kontribusi yang baik dalam menciptakan insan yang siap memiliki etika berlalu lintas, namun dalam suatu program yang dijalankan tentunya ada faktor pendukung keberhasilan program tersebut. Pelaksanaan safety riding di SMK PGRI 1 Taman di dukung oleh kebijakan yang diterapkan oleh sekolah yang memang mengatur dengan rapi yaitu dengan menyiapkan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini

menandakan adanya keseriusan sekolah dalam ikut serta menanamkan sikap dan norma-norma berlalu lintas. Selain itu sekolah juga menyiapkan kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan sehingga peraturan berlalu lintas tersebut diterima dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Tanpa adanya kegiatan sosialisasi yang berkala siswa tidak akan peduli dengan peraturanyang diterapkan. Dengan kegiatan sosialisasi tentunya diberikan juga dukungan dengan memberikan contoh ataupun keteladanan yang dilakukan oleh Bapak/Ibu guru.

Pengawasan yang dilakukan oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidikan safety riding memberikan penguatan agar semua warga sekolah benar-benar menyadari pentingnya pendidikan safety riding. Hal ini juga diperlukan kegiatan evaluasi karena suatu program sangat memerlukannya untuk mengetahui tingkat keefektifannya dan mengurangi kendala yang muncul agar program tersebut berhasil diterapkan.

Selain faktor pendukung muncul juga adanya faktor yang menghambatnya, yaitu antara lain kurangnya rasa kedisiplinan dari siswa yang ini dapat menghambat pendidikan safety riding karena ketika sekolah telah memberikan peraturan dan tindakan yang mendukung program inisiswa menjadi pendukung penting pelaksanaannya. Untuk itulah kegiatan sosialisasi harus selalu dilakukan secara berkala.

Koordinasi yang dibangun oleh semua komponen sekolah akan mempengaruhi pelaksanaan pendidikan ini, semua komponen sekolah perlu dilibatkan baik dari line terbawah sampai paling atas harus ada komunikasi sehingga program ini dapat didukung oleh semua komponen. Pengintegrasian materi lalulintas di dalam pelajaran PPKn sangat membantu kelancaran penanaman etika berlalulintas namun demikian sebenarnya semua mata pelajaran juga menganut komponen yang sama dengan PPKn yaitu melibatkan kemampuan kognitif dan afektif yang perlu dimiliki oleh siswa untuk itu mungkin perlu ditanamkan juga dalam mata pelajaran yang sekiranya masih satu rupun dengan PPKn yaitu misalnya pendidikan agama. Semua mata pelajaran tentunya menanamkan sikap kedisiplinan untuk itu semua mata pelajaran dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pendidikan safety riding.

KESIMPULAN

Upaya yang ditempuh oleh SMK PGRI 1 Taman dalam menanamkan pendidikan safety riding yaitu antara lain: Penerapan kurikulum tentang materi lalu lintas yang terintegrasi dalam pembelajaran PPKn, pembuatan rambu-rambu untuk para pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yaitu adanya jalur hijau dibuat untuk para pejalan kaki, dibedakannya Jalur keluar dan masuk

kendaraan, penataan Lay out parkir yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan tertib. Adanya pemisahan antara tempat parkir mobil dan motor, Verboden (dilarang masuk), himbuan pemakaian spion dan helm serta SIM dan STNK. Selain itu ada kegiatan pembinaan atau sosialisasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan. Adanya PKS (Patroli Keamanan Sekolah) yang juga mendukung pelaksanaan pendidikan safety riding.

Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan safety riding yaitu adanya kebijakan yang memberikan dukungan penuh, adanya sosialisasi yang sering dilakukan oleh kesiswaan dan STP2K, adanya sistem pengawasan yang berkesinambungan, adanya kepedulian semua warga sekolah, serta adanya sistem evaluasi yang sering dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, B Matthew dan Huberman H Michael. 1992. *Analisis data kualitatif* jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, Lexyi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexyi. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Soebagya, Ki Sugeng. 2010. *Pembelajaran Etika Berlalu Lintas.*: Gemari. Artikel.
- Soerjono soekanto. 1984 . *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta :UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta :Rajawali.
- Program kerja Safety Riding SMK PGRI 1 Taman.
- Jurnal :
Kristiono, Natal. *Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.* Jurnal Harmony 2 (2), 193-204.
- Wiratomo, Giri, dkk. *Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Guru Ppkn Jenjang Smp Di Kota Semarang.*Jurnal Integralistik 28 (2), 119-130.